

**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ANIS AMRULLAH  
NIM. 190802032**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Amrullah  
NIM : 190802032  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 09 September 2001  
Alamat : Rambayan Lueng, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 13 Januari 2025

Yang menyatakan,



**ANIS AMRULLAH**  
NIM. 190802032

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**ANIS AMRULLAH**  
NIM. 190802032

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**A R - R A N I R Y**  
Disetujui untuk dimunaqasahkan oleh :

Pembimbing I

**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.**  
NIP. 197309212000032004

Pembimbing II

**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**  
NIP. 199011192022031001

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG  
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

**Anis Amrullah**  
**190802032**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025  
15 Rajab 1446 H

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

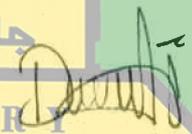
  
**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.**  
NIP. 197309212000032004

  
**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**  
NIP. 199011192022031001

Penguji I

Penguji II

  
**Aklima, S.Fil., M.A.**  
NIP. 198810062019032009

  
**Dedi Arifka, M.P.A.**  
NIP.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Dr. Muji Afulia, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 7403271999031005

## ABSTRAK

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan penanganan terhadap masyarakat miskin, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan sebuah program yang disebut Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, yang dimana program ini juga di implementasikan di Dinas Sosial Kabupaten Pidie. Pada pelaksanaannya SLRT pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) terhadap Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini terdiri dari dua indikator utama sebagai fungsi dari SLRT yang diperoleh dari pedoman umum Sistem Layanan dan Rujukan. Dua indikator yang diperoleh, yaitu Integrasi Informasi, Data, dan Layanan serta Identifikasi Keluhan, Rujukan, dan Penanganan Keluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SLRT sudah dijalankan sesuai dengan mekanismenya, Integrasi yang dilakukan oleh SLRT melalui tahapan penggabungan antara Program Perlindungan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Program Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), juga melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Mekanisme Identifikasi dan rujukan diawali dengan proses pencatatan atas keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian dilakukan verifikasi terhadap keluhan tersebut dan kemudian dilakukan penanganan dengan membuat rujukan untuk ditangani oleh divisi tertentu sesuai jenis keluhan yang diterima.

***Kata Kunci: Kemiskinan, Penanggulangan, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu***

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Syahkubat Hasan dan Ibu Marlaini. Terima kasih atas doa, nasehat, motivasi, *support* yang selalu diberikan dan bimbingannya, serta kasih sayang yang senantiasa selalu diberikan kepada peneliti.

8. Teruntuk sahabat-sahabat saya, terima kasih dukungan, semangat, kerjasamanya dan doanya selama ini. Serta kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Administrasi Negara.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 25 Januari 2025  
Peneliti

Anis Amrullah  
NIM. 190802032



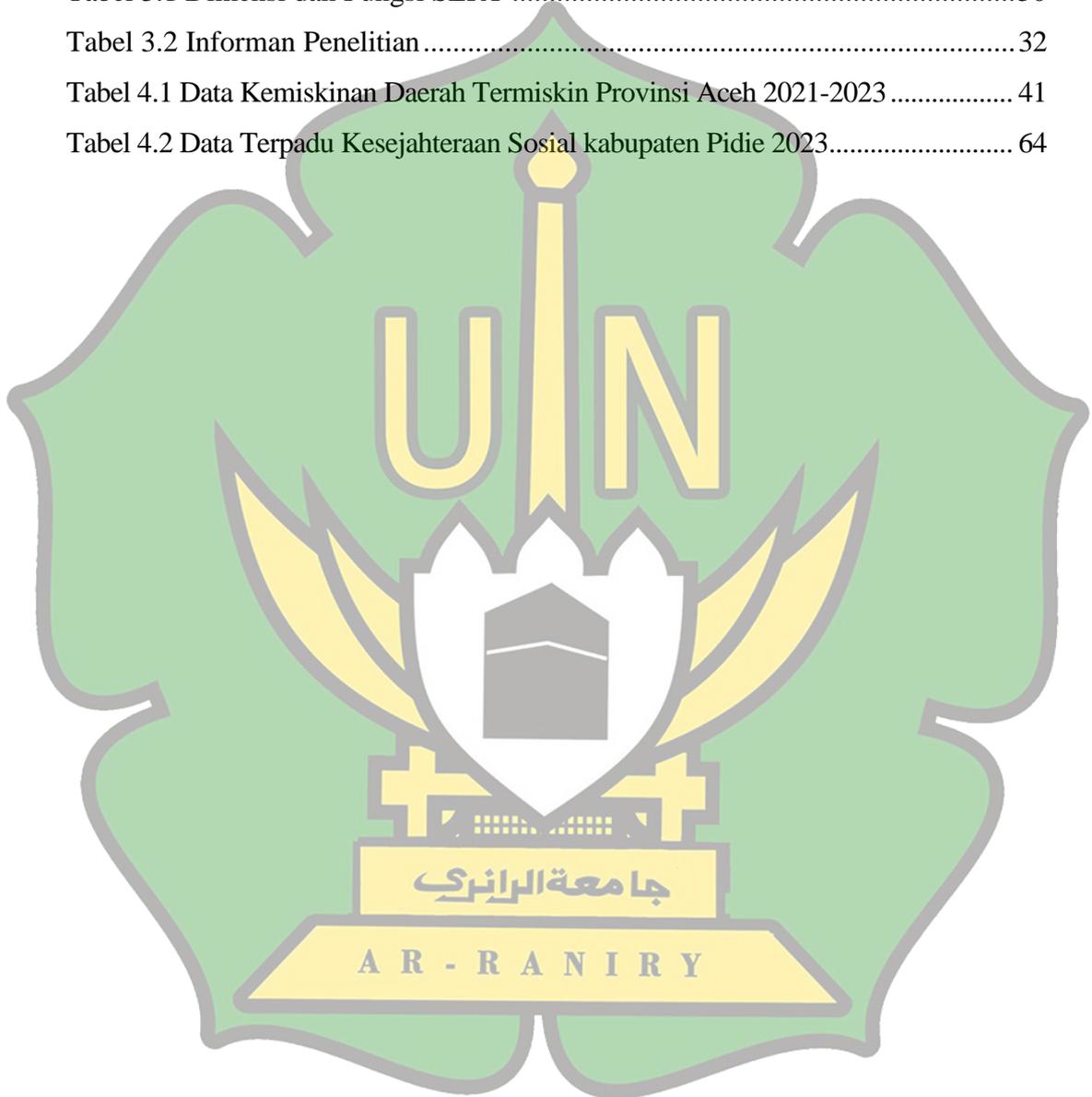
## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Kegunaan Penelitian .....	9
1.6 Penjelasan Istilah .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Teori Kebijakan .....	17
2.3 Teori Pelayanan Publik.....	19
2.4 Konsep Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.....	20
2.5 Penanggulangan Kemiskinan.....	22
2.6 Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.....	23
2.7 Kerangka Berpikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Sumber Data .....	29

3.5	Informan Penelitian.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7	Teknik Analisis Data .....	34
3.8	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
4.1	Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pidie .....	38
4.1.1	Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pidie .....	39
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie .....	40
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pidie.....	41
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	41
4.2.1	Analisis Kemiskinan di Aceh dan Peran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dalam Penanganannya .....	41
4.2.2	Mekanisme Pelaksanaan Sistem layanan dan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie .....	44
4.2.3	Efektivitas Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu terhadap Penanggulangan Kemiskinan.....	61
4.2.4	Faktor Penghambat Mekanisme Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Terhadap Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
5.1	Kesimpulan .....	71
5.2	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>81</b>

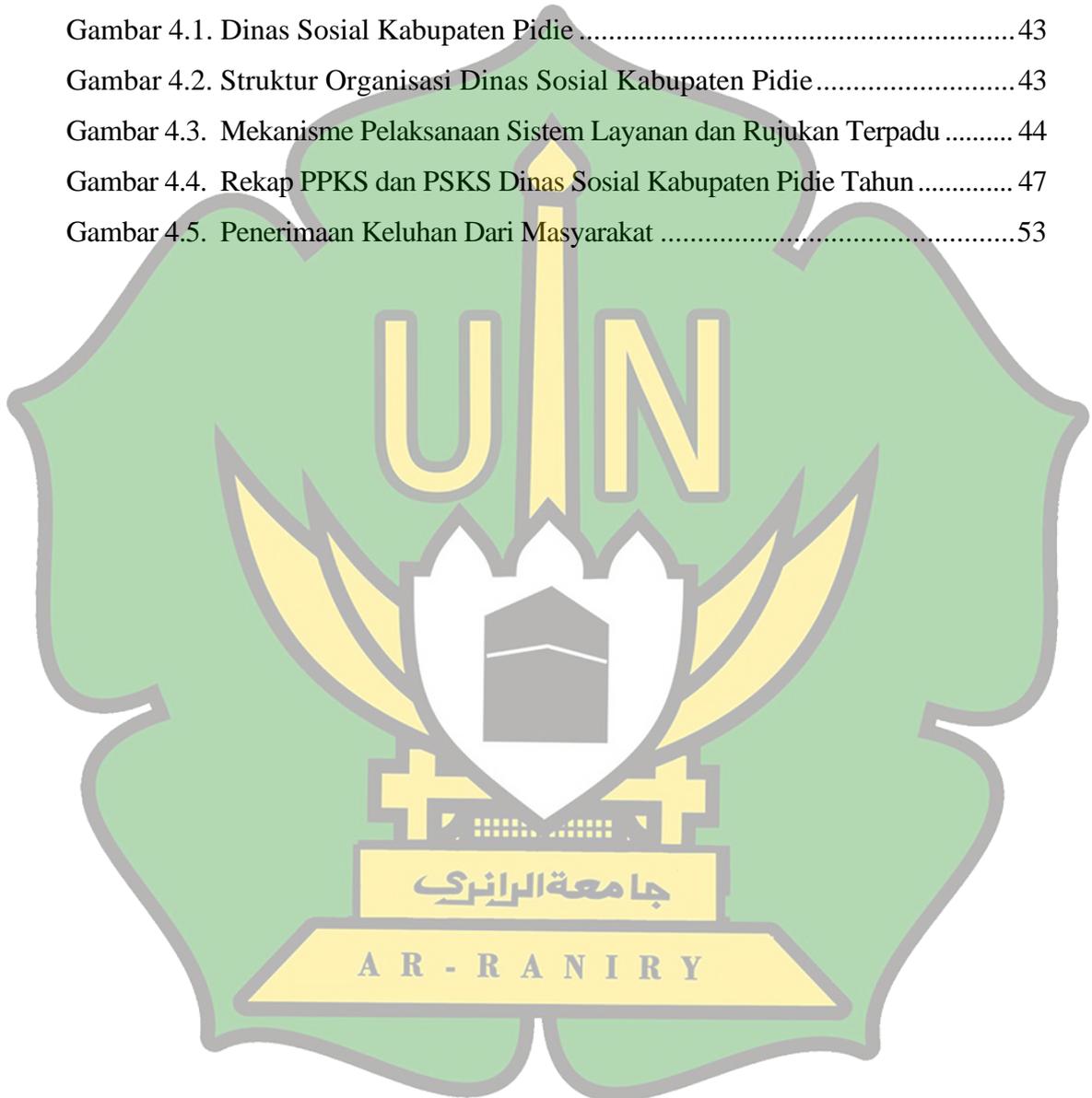
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir.....	28
Tabel 3.1 Dimensi dan Fungsi SLRT .....	30
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Data Kemiskinan Daerah Termiskin Provinsi Aceh 2021-2023.....	41
Tabel 4.2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kabupaten Pidie 2023.....	64



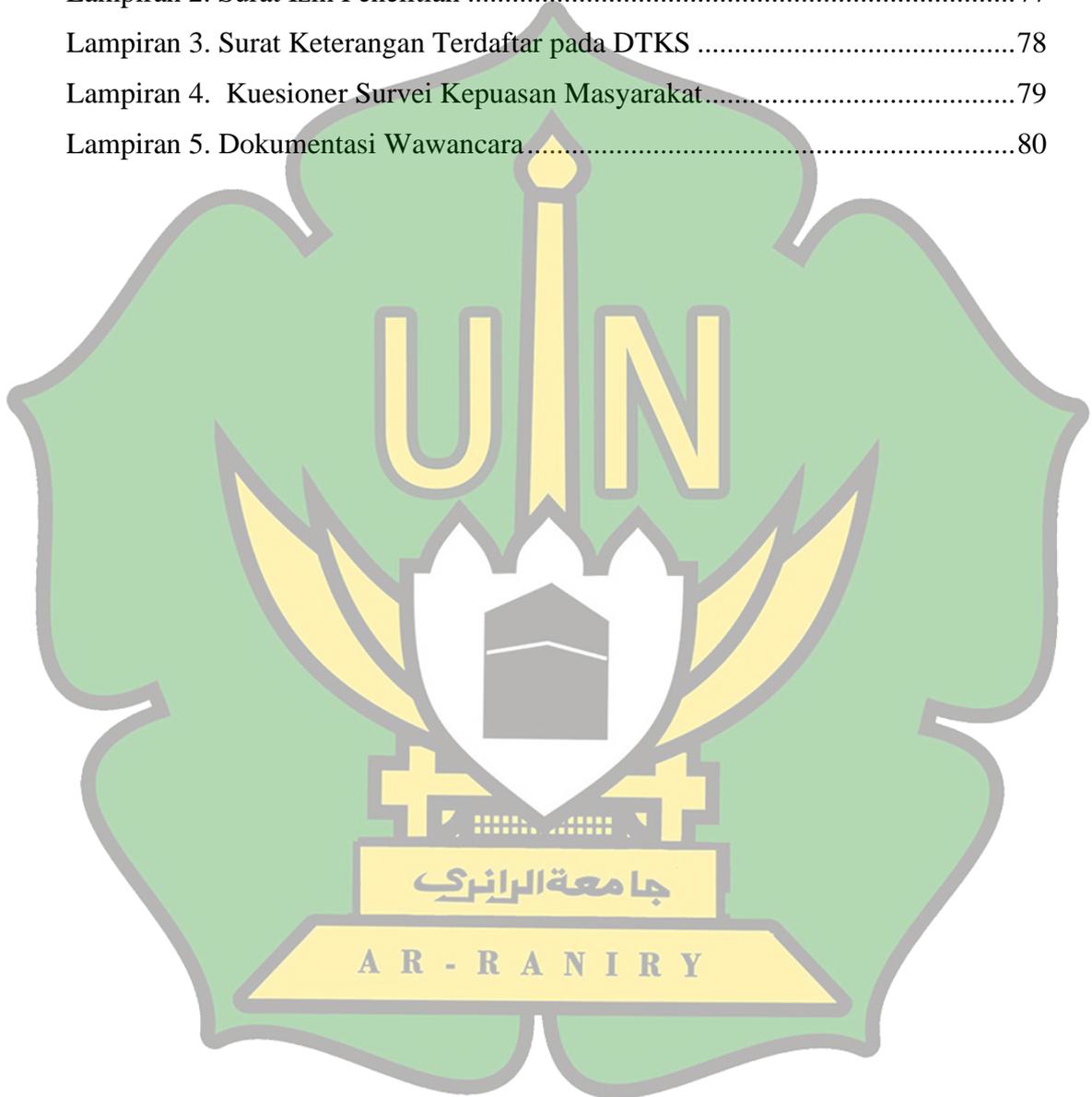
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Kemiskinan Se-Sumatera Tahun 2023 .....	3
Gambar 1.2. Gambaran Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2023 .....	4
Gambar 4.1. Dinas Sosial Kabupaten Pidie .....	43
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pidie.....	43
Gambar 4.3. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu .....	44
Gambar 4.4. Rekap PPKS dan PSKS Dinas Sosial Kabupaten Pidie Tahun .....	47
Gambar 4.5. Penerimaan Keluhan Dari Masyarakat .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing.....	76
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....	77
Lampiran 3. Surat Keterangan Terdaftar pada DTKS .....	78
Lampiran 4. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat.....	79
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara.....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan isu yang sering menjadi fokus pembahasan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat, sebagai entitas yang terdampak langsung oleh kemiskinan, juga memegang peran penting dalam upaya penanganannya. Kemiskinan ditandai dengan kondisi dimana kehidupan dimana sebagian besar orang tidak memiliki sumber daya yang mencukupi dalam memenuhi beragam kebutuhan dasarnya dan hidup di bawah kebutuhannya.<sup>1</sup> Pemerintah dalam menghindari serta menanggulangi resiko kesenjangan sosial yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.<sup>2</sup> Sebagaimana yang memiliki maksud dalam mengatur dan mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menyediakan landasan hukum yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh negara, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial.

Dalam kesejahteraan sosial masih ditemukannya beragam situasi dimana banyak warga negara yang masih belum memperoleh haknya untuk memenuhi berjenis-jenis kebutuhan seperti kebutuhan dasar yang sesuai dan

---

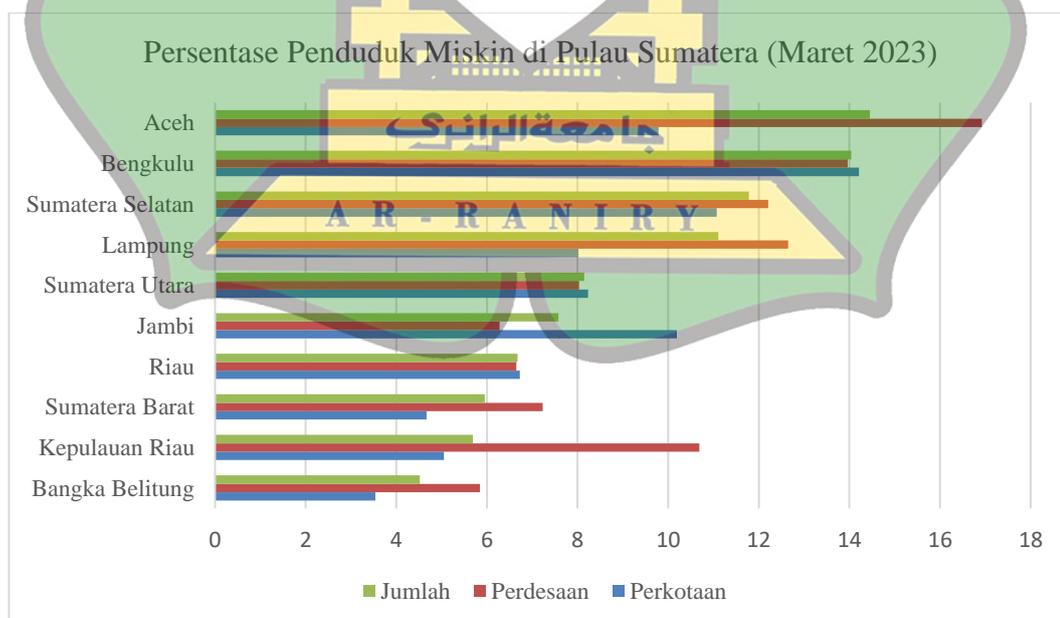
<sup>1</sup> Rudy Susanto dan Indah Pangesti, "Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 7, no. 2 (31 Januari 2021): 271, <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>.

<sup>2</sup> Republik Indonesia.2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretaris Negara. Jakarta

layak, hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya akses pelayanan sosial yang disediakan oleh negara. Sehingga dengan adanya dilema ini mengakibatkan banyak warga negara tidak bisa menjalankan kehidupan secara pantas dan terhormat.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Secara keseluruhan data angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36% pada Maret 2023. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat bahwa di kawasan perkotaan terdapat 7,29% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, sementara di kawasan perdesaan angkanya mencapai 12,22%. Dalam angka, hal ini berarti ada sekitar 11,74 juta jiwa di kawasan perkotaan dan 14,16 juta jiwa di kawasan perdesaan yang hidup dalam kemiskinan.

**Gambar 1.1**  
**Data Kemiskinan Se-Sumatera Tahun 2023**



Sumber ; Badan Pusat Statistik, 2023

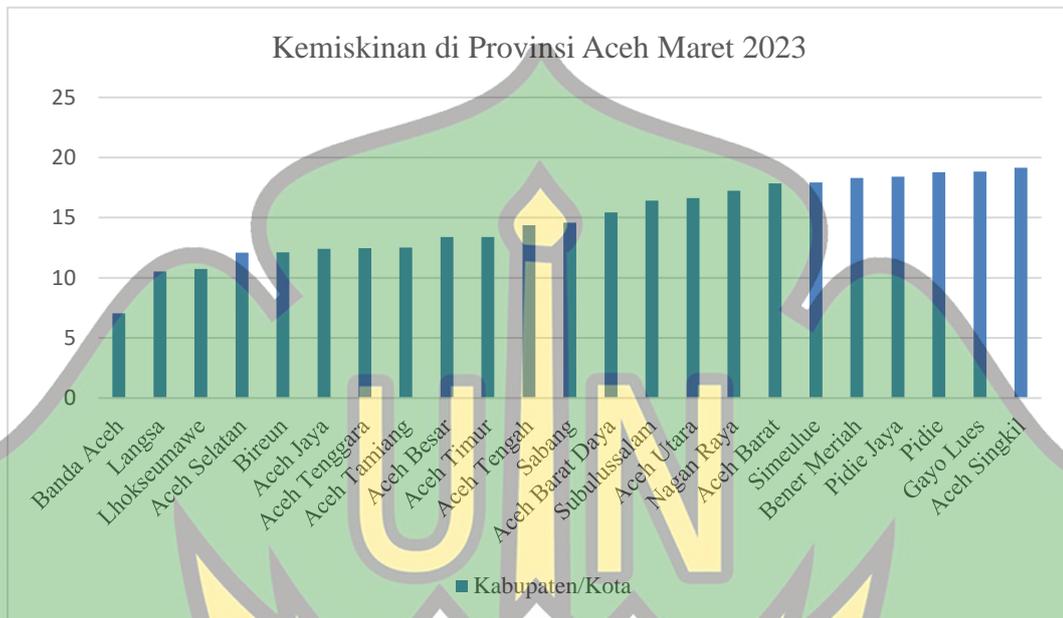
Gambaran kemiskinan dari grafik diatas menunjukkan kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh paling tinggi di pulau Sumatera pada Maret 2023 dimana tercatat angka kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 14.45%. Maka oleh karenanya hal ini masih menjadi suatu persoalan yang mendalam dan membutuhkan penanganan segera. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada Maret 2023, ditemukan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Aceh secara keseluruhan mencapai 14,45% dengan jumlah 806,75 ribu jiwa. Namun secara khusus data kemiskinan di Provinsi Aceh di kawasan perkotaan mencapai 9,79% berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, di kawasan pedesaan, mencapai 16,92% menghadapi kondisi serupa. Dalam angka, hal ini berarti sekitar 189,16 ribu jiwa di perkotaan dan 617,59 ribu jiwa di pedesaan, namun apabila dijumlahkan terdapat 806,75 ribu jiwa di Aceh yang hidup dalam kondisi kemiskinan.<sup>3</sup>

Sebagai landasan awal analisis, data angka kemiskinan di kabupaten memiliki peran kunci dalam menilai program pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan serta dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan sosial. Berikut adalah data kemiskinan yang terdapat pada Provinsi Aceh yang disajikan untuk memahami tingkat kemiskinan di tingkat lokal.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. (2023). Diperoleh januari 20, 2024

**Gambar 1.2**  
**Gambaran Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2023**



Sumber ; Badan Pusat Statistik, 2023

Gambaran kemiskinan dari grafik diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie termasuk kedalam satu salah satu Kabupaten termiskin di Aceh, menurut data Badan Pusat Statistik, Pidie merupakan kabupaten dengan urutan ketiga termiskin di Aceh yakni 18,78% setelah Kabupaten Gayo Lues. Urgensi kemiskinan ini menjadikan Kabupaten Pidie dengan kompleksitas permasalahan yang kompleks yang berdampak terhadap permasalahan sosial lainnya. Data tersebut menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie cukup tinggi, hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Pidie. Menurut data statistik terbaru, pada bulan Maret, Kabupaten Pidie mengalami

prevalensi kemiskinan sebesar 18,78%. Angka tersebut mengindikasikan keberlanjutan isu kemiskinan yang signifikan di wilayah tersebut.

Kemiskinan yang dialami Kabupaten Pidie dapat dikategorikan sebagai kemiskinan struktural, kronis, dan multidimensi. Kemiskinan struktural terjadi karena ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur, yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan kronis terkait dengan kondisi kemiskinan yang berlangsung turun-temurun, diperburuk oleh dampak konflik masa lalu yang menghambat pemulihan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Sementara itu, kemiskinan multidimensi menggambarkan kemiskinan yang tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti akses terhadap air bersih, listrik, transportasi, dan layanan Kesehatan.

Upaya pemerintah terhadap penindakan terkait dengan permasalahan sosial masih belum berjalan dengan maksimal dan tidak tepat pada sasaran khususnya kemiskinan dan kesejahteraan. Program layanan sosial seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dinilai tidak tepat pada sasaran yang seharusnya. Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan berbagai jenis bantuan sosial di tingkat provinsi hingga desa. Program tersebut ditujukan untuk individu dan sekelompok masyarakat yang mengalami kerentanan dalam sosial agar dapat hidup secara layak. Namun berbagai program tersebut belum dapat

berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial sehingga menimbulkan masalah pada integritas dan transparansi data, responsivitas, serta validasi dan keakuratan data yang rendah<sup>4</sup>.

Maka untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan maka pemerintah membuat langkah kemajuan dengan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang disusun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disusun sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 yang telah mengamanatkan terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah harus terarah, berkelanjutan dan terpadu. Hal ini dilakukan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integrative sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.<sup>5</sup>

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu<sup>6</sup>. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat

---

<sup>4</sup> Nabila Amanatillah, "Program Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dalam Penanggulangan Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* Volume 7 Nomor 4 (November 2022).

<sup>5</sup> Kementerian Sosial. (2016). Pedoman Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kementerian Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial.

<sup>6</sup> Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (2018)

miskin serta dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.<sup>7</sup>

Dalam pedoman umum pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) disebutkan tujuan daripada dibentuknya SLRT adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan.<sup>8</sup> Maka dalam rangka penerapan SLRT untuk menanggulangi kesenjangan sosial serta dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pidie maka tentunya dibutuhkan sebagai salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sebuah aspek penting dalam bidang pelayanan terkait dengan kemiskinan yang berfokus pada pengintegrasian layanan sosial yang melibatkan sejumlah penyedia layanan dan rujukan, dengan tujuan meningkatkan koordinasi, efisiensi, serta aksesibilitas pelayanan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dibentuk dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pidie. Meskipun SLRT telah diimplementasikan dengan upaya

---

<sup>7</sup> Kementerian Sosial. (2016). Pedoman Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kementerian Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial

<sup>8</sup> Ibid

mengintegrasikan informasi, data, dan layanan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Kabupaten Pidie masih menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan terjadinya kesenjangan antara tujuan SLRT dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Pidie, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018. Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie masih belum dapat berjalan secara maksimal, dimana keterlibatan Masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan layanan tergolong rendah, bahkan Sebagian besar Masyarakat sendiri masih tidak mengetahui fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi kesenjangan pada Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi permasalahan terkait dengan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) terhadap penanggulangan kemiskinan yang tertera pada Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018, tentang Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, serta faktor- faktor hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan fungsinya pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang telah yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) terhadap penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie?
2. Apa saja faktor penghambat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu terhadap penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu terhadap penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu terhadap penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menambah literatur dan sumber informasi terkhusus di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terkait Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pidie.
- b. Penelitian ini diharapkan akan memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten Pidie.

## 2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Instansi Pemerintah, penelitian ini kiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk merumuskan suatu kebijakan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten Pidie.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Adapun Penjelasan istilah ialah untuk menghindari kesilapan dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu pengarang ingin memaparkan beberapa sebutan yang terdapat judul pengarang. Antara lain sebagai berikut:

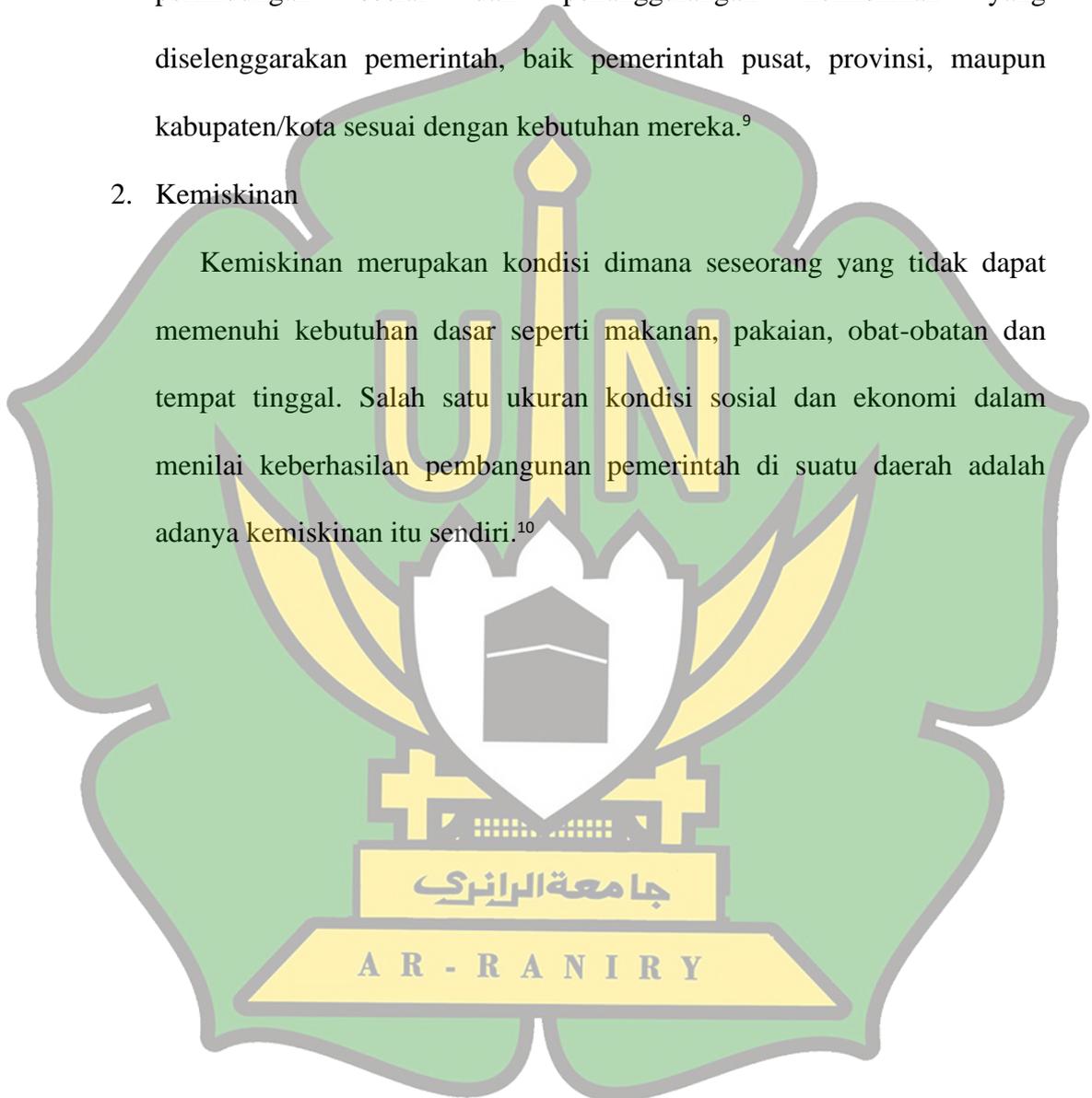
#### 1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tahun 2017 menjelaskan SLRT merupakan sistem layanan yang

membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>9</sup>

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri.<sup>10</sup>



---

<sup>9</sup> Kementerian Sosial. (2016). Pedoman Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kementerian Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial.

<sup>10</sup> Laga Priseptian and Wiwin Priana Primandhana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan," FORUM EKONOMI 24, no. 1 (January 31, 2022): 45–53, <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>.